

GAGASAN KI HAJAR DEWANTARA DI BIDANG POLITIK

SUHARTONO WIRYOPRANOTO

1

A. Biografi Singkat

Pada dasarnya sejarah adalah hubungan antarbiografi yang melewati atau menembus batas waktu. Membicarakan Ki Hajar Dewantara (KHD), hal ini berarti memahami relasinya dengan tokoh-tokoh sejarah yang sezaman khususnya di bidang politik, meski bidang-bidang lain tidak dapat ditinggalkan. Sebaran spasialnya tentunya seluruh nusantara dan lingkup temporalnya mencakup periode pemerintahan penjajahan Belanda di Indonesia pada akhir abad XIX sampai dengan pertengahan abad XX.

KHD lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama RM Soewardi Soerjaningrat (SS), putra GPH Soerjaningrat, atau cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya SS adalah keluarga bangsawan Pakualaman. Sebagai bangsawan Jawa, SS mengenyam pendidikan ELS (*Europeesche Lagere School*) – Sekolah Rendah untuk Anak-anak Eropa. Kemudian SS mendapat kesempatan masuk STOVIA (*School tot Opleiding*

voor Inlandsche Artsen) biasa disebut Sekolah Dokter Jawa. Namun karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan sehingga SS tidak tamat dari sekolah ini.

Adapun profesi yang digelutinya adalah dunia jurnalisme yang berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah pada waktu itu: *Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer*, dan *Poesara* yang melontarkan kritik sosial-politik kaum bumiputra kepada penjajah. Tulisannya komunikatif, halus, mengena, tetapi keras. Jiwanya sebagai pendidik tertanam dalam sanubarinya direalisasikan dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa (1922) guna mendidik masyarakat bumiputra.

Sebagai figur dari keluarga bangsawan Pakualaman SS berkepribadian sangat sederhana dan sangat dekat dengan *kawula* (rakyat). Jiwanya menyatu lewat pendidikan dan budaya lokal (Jawa) guna menggapai kesetaraan sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Kekuatan-kekuatan inilah yang menjadi dasar SS dalam memperjuangkan kesatuan dan persamaan lewat nasionalisme kultural sampai dengan nasionalisme politik.

Keteguhan hatinya untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia lewat pendidikan dilakukan dengan resistensi terhadap Undang-undang Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonnantie, 1932*). Undang-undang yang membatasi gerak nasionalisme pendidikan Indonesia akhirnya dihapus oleh pemerintah kolonial. Perjuangannya di bidang politik dan pendidikan inilah kemudian pemerintah Republik Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dalam pemerintahan RI, mengangkat

KHD sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1950). KHD mendapat gelar doktor honoris causa dari Universitas Gadjah Mada (1959). Pemerintah RI mengangkat KHD sebagai Pahlawan Nasional (1959). Meski perjuangannya belum selesai untuk mendidik putra bangsa, jelas KHD memelopori lahirnya pendidikan di Indonesia. KHD wafat pada 26 April 1959 dimakamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta.

Guna memberikan rambu-rambu dalam artikel ini perlu disampaikan pokok pertanyaan yang mengarahkan alur penjelasan artikel. Mengapa gagasan politik KHD membuka jalan bagi pendidikan bangsa dan menyebarkan faham kebangsaan demi tercapainya kemerdekaan Indonesia? Pokok pertanyaan ini yang akan memandu penjelasan tentang gagasan politik KHD bagi perpolitikan Indonesia terutama pada masa Pergerakan Nasional. Sekaligus artikel ini akan menemukan sesuatu yang baru berkaitan dengan peran KHD sebagai tokoh nasional bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Munculnya Pemikiran Politik: Kemajuan dan Kesetaraan

Salah satu bagian penting politik kolonial yang dipertahankan di koloni adalah politik diskriminasi yang membedakan kedudukan dan peran antara penjajah dan terjajah. Diskriminasi itu dipertahankan untuk mendukung kedudukan dan peran sosial-politik kolonial yang menghegemoni semua bidang kehidupan kolonial (Ki Hajar Dewantara, 1952: 108-

104; Sartono Kartodirdjo, 1967). Pemerintah kolonial yang diidentifikasi sebagai penguasa otomatis mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada orang bumiputera baik secara material dan spiritual. Hal-hal inilah yang mendukung perasaan superioritas sebagai penjajah, pemerintah kolonial berhak mengatur inferioritas bumiputra.

Yang dimaksud dengan pemikiran politik adalah usaha KHD untuk mendapatkan sesuatu yang oleh pemerintah kolonial dipertahankan. Oleh karena itu pemikiran politik KHD dilakukan dengan multifaset, bukan hanya bidang politik melulu tetapi juga sosial dan kultural.

Diskriminasi menengarai perbedaan fisik dan kultural. Mereka merasa sebagai bangsa yang memiliki ras Arya yang mempunyai peradaban tinggi di Eropa dibawa sampai ke koloni. Sebagai ras yang hebat dan kuat mampu menaklukkan lautan luas dan menjajah serta menguasai bumiputera yang lebih rendah peradabannya. Orang-orang bumiputera yang berperadaban rendah harus diadabkan. Oleh karena itu, kolonialisme sering berkedok mengadabkan bangsa lain meski sebenarnya berisi pemerasan, pembedaan, dan penguasaan. Meski demikian bangsa Barat termasuk Belanda bersiteguh mengatakan perlawatannya ke dunia Timur merupakan *mission sacrée* alias tugas suci untuk mengadabkan bangsa-bangsa Timur termasuk Indonesia. Ada sekian banyak dalih untuk melegalkan tindakannya di dunia Timur, yaitu dengan menyebutnya *white man's burden*, yang tidak lain sepertinya itu semua merupakan tugas atau beban orang bule di dunia Timur (Sartono Kartodirdjo,

1967). Memang sangat luar biasa mengemas kepentingannya rapi dengan istilah yang memiliki rasa perikemanusiaan yang sangat tinggi. Namun, prakteknya di koloni jauh panggang dari api. Pemerintah kolonial dengan aparat kolonialnya berperilaku menyimpang dari cita-cita awal untuk mengadabkan bangsa Timur. Praktek-praktek diskriminasi, kekerasan, penekanan, kecurangan, korupsi dan sejenisnya sangat tidak mengenakan perasaan orang bumiputra. Ketidakpuasan menyelimuti semua perasaan etnik-etnik di koloni yang menginginkan kehidupan setara antara penjajah dan terjajah baik sosial maupun politik (Suwardi Suryaningrat, 1918).

Dari latar belakang kehidupan sosial-politik inilah pikirannya jauh ke depan yaitu bagaimana caranya orang-orang bumiputra yang terpinggirkan ini mendapat kesempatan untuk mendapat kesetaraan secara sosial-politik dalam masyarakat kolonial. Memang secara tidak langsung di lingkungan Pakualaman sudah terbentuk *cultuur-milieu* berupa lingkungan kultur yang maju yang didukung oleh para elite Pakualaman (Shiraishi, 1991: 38, 56-58, 110).

Sebagai contoh adalah Pangeran Ario Notodirodjo, putra Paku Alam V, seorang elite terkemuka Ketua Budi Utomo (1911) yang juga melakukan pembaruan di lingkungan Pakualaman dan bisa disebut salah seorang pelopor pergerakan nasional Jawa. Juga RM Surjopranoto, putra GPH Suryaningrat dan kakak SS, mendirikan sekolah Adhi Dharmo. Dalam kariernya sebagai pemimpin bumiputra Suryopranoto sangat membela nasib buruh sehingga dikenal sebagai “Raja mogok”. Bagi buruh, mogok

adalah senjata utama untuk menuntut perbaikan sosial-politik, meski dia harus keluar-masuk penjara (Shiraishi, 1991: 220-224).

Secara umum lingkungan elite Pakualaman sudah membangun kemajuan untuk masyarakat lokal Jawa, mencari kesetaraan dalam masyarakat kolonial yang mempunyai kandungan unsur demokrasi dalam politik dan mendorong kesejahteraan bagi masyarakat kecil pada umumnya. Sebagai kelanjutan perjuangan keluarga Pakualaman adalah perjuangan di bidang pendidikan pada umumnya. Pendapat seorang sosiolog mengatakan bahwa pendidikan adalah dinamite yang dapat menghancurkan struktur masyarakat kolonial yang rigid. Disamping itu tentunya paska kemerdekaan, pendidikan tetap menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

C. Partisipasi dan Resistensi Terhadap Kolonialisme: Demokratisasi

Kepincangan dalam masyarakat kolonial adalah kuatnya diskriminasi sosial dan politik. Usaha mempertahankan diskriminasi ini dimaksudkan agar terjaga kewibawaan kolonial dan membuat distansi dengan masyarakat pribumi tetap terjaga. Dengan kata lain, diskriminasi melanggengkan penjajahan. Itulah sebabnya pendekatan terhadap bumiputra merupakan hal tabu. Sistem kolonialisme Belanda yang menjauhkan antara penjajah dan terjajah tetap terpelihara sehingga mobilitas vertikal kaum pribumi tetap terkontrol. Komunikasi sosial

politik antara penjajah dan terjajah sangat renggang dan bahkan terjadi jurang yang dalam sehingga melanggengkan sistem pemerintahan tidak langsung, artinya masyarakat pribumi tetap diperintah penguasa tradisional, sehingga penguasa kolonial cukup menghubungi penguasa bumiputera dalam menjalankan pemerintahan kolonial.

Bagaimana cara pemerintah kolonial menjauhkan diri dari jangkauan masyarakat bumiputra antara lain dengan mengeluarkan RR 111 (*Regeerings Reglement*), atau Peraturan Pemerintah Kolonial yang membatasi gerak politik masyarakat bumiputra. Jadi, sebenarnya pemerintah kolonial sudah menutup aktivitas politik terhadap pemerintah kolonial. RR 111 ini sudah terbit untuk mengantisipasi gerakan politik sehingga gerakan massa Jawa yang timbul kemudian dalam bentuk gerakan kultural sebagaimana kemudian dimanifestasikan dalam lahirnya organisasi Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908.

Dari kacamata politik dapat dipandang lahirnya BU adalah terobosan terhadap RR 111. Para priyayi Jawa, dokter Wahidin Sudirohusodo, berkolaborasi dengan mahasiswa STOVIA, Sutomo dan kawan-kawannya, berhasil menghimpun diri dalam memajukan masyarakat Jawa pada waktu itu lewat pendidikan, sehingga pemerintah kolonial tidak dapat menindak gerakan BU, yang berbasiskan gerakan kultural. Selain itu, era lahirnya BU sejalan dengan politik kolonial etis yang memberi kesempatan pendidikan kepada masyarakat Jawa meski memiliki interest kolonial yang kapitalistis. Politik kolonial waktu itu dengan triasnya sebagai bagian dari humanisme yang terselubung oleh

kepentingan kapitalisme, artinya meski kemudahan etisisme tetapi yang diharapkan adalah keuntungan kolonial yang lebih banyak lagi.

Partisipasi dan resistensi yang dilakukan oleh SS cukup panjang dalam perjuangan politik. Pengalaman awal dalam politik ketika SS menjadi aktivis dan seksi propaganda BU. Dalam kongres BU (1908), SS mengorganisasikan kongres itu. EFE Douwes Dekker (DD) alias Setyabudi Danudirja mendirikan *Indische Partij* (IP) di Bandung pada 25 Desember 1912. SS dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo bergabung di dalamnya. Mengapa terjadi kolaborasi Indo dan bumiputra tidak lain ingin membangun kekuatan besar untuk menghadapi pemerintah kolonial. Kaum Indo yang tersisih dari pergaulan totok harus membangun solidaritas campuran Indo dan Bumiputra yang juga terhegemoni oleh pemerintah kolonial. Oleh karena itu, dalam IP berkolaborasi DD, SS, dan Tjipto Mangoenkoesoemo yang dikenal “Tiga Serangkai” merupakan kekuatan nasionalis awal pergerakan (Koch, 1951: 37-55).

Dalam IP, kolaborasi bersama DD, SS dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo makin radikal. Kombinasi Indo dan bumiputra, menjadi kekuatan yang mampu menghadapi pemerintah kolonial. Tiga orang tokoh IP mempunyai pengalaman terpinggirkan dalam masyarakat kolonial. DD adalah Indo yang tersingkir karena inferioritasnya dibanding dengan totok yang lebih terampil, SS memang berjiwa kerakyatan nasionalis Jawa yang sedang tumbuh, Tjipto Mangoenkoesoemo adalah tokoh yang kritis terhadap diskriminasi kolonial. IP menanamkan

benih nasionalisme awal dengan pernyataannya “*Indië voor die Indiërs*”, atau “Hindia untuk orang-orang Hindia” dalam arti mengakui Hindia sebagai tanah airnya yang merupakan prinsip utama nasionalisme (Koch, 1951: 39).

Untuk selanjutnya dari pengertian yang nasionalistis ini berarti orang totok dan pemerintah kolonial harus meninggalkan Hindia alias dilawan. Dalam Anggaran Dasar IP disebutkan bahwa tujuan IP untuk membangun patriotisme bangsa Hindia, yaitu kepada tanah air yang telah memberi kehidupan, dan menganjurkan kerjasama berdasarkan persamaan sistem pemerintahan guna memajukan tanah air Hindia dan mempersiapkan kehidupan masyarakat merdeka”. IP menjadi model partai politik yang menerima keberagaman etnik di Indonesia guna menggalang persatuan dan semangat kebangsaan. Paham kebangsaan ini setelah melalui perjalanan panjang diolah dan dimodifikasi oleh Perhimpunan Indonesia (1924) dan Partai Nasional Indonesia (1927) (Abdurachman Surjomihardjo, 1979).

Sementara itu ”Tiga Serangkai” mendirikan Komite Bumiputera pada Juli/Agustus 1913, tetapi yang memainkan peran penting dalam komite itu SS. SS menulis karangannya monumental dalam sejarah pemikiran politik Indonesia berjudul “*Als ik een Nederlander was...*” (*Seandainya aku seorang Belanda*) yang mengkritik pemerintah kolonial yang akan menyelenggarakan pesta 100 tahun Nederland lepas dari penjajahan Prancis. Hanya saja biaya pesta itu dibebankan pada masyarakat bumiputra dengan mengumpulkan dana dari saku

orang bumiputra dan menarik berbagai pajak. Karangan itu segera meluas ke masyarakat karena diterjemahkan oleh Abdoel Moeis ke dalam bahasa “Melayu”. Untuk menyingkirkan tiga tokoh berbahaya itu bagi *rust en orde* harus dikenakan *exorbitante rechten* dan cepat-cepat tiga tokoh berbahaya itu ditangkap pada 18 Agustus dan harus meninggalkan Tanjung Periuk pada 6 September 1913 dengan tujuan Nederland.

Karangan SS itu dijawab oleh seorang Belanda kolonial yang ditulis oleh H. Mulder, redaktur harian *Preanger Bode* berjudul “*Als ik eens Inlander was...*” (Sekiranya saya seorang anak negeri...) tentu isinya memuakkan dan sangat menghina martabat bumiputra. Tanggal 6 September 1913 itu sebagai hari keberangkatan “Tiga Serangkai” itu disebut sebagai “Hari Raya Kebangsaan” (Koch, 1951 53-54). Di Parlemen Nederland, “Tiga Serangkai” itu dibela oleh *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (S.D.A.P), partai buruh, agar pemerintah kerajaan Belanda mencabut pembuangan tiga tokoh itu, meski gagal.

IP berumur pendek karena radikalismenya dan menyerang pemerintah kolonial sehingga IP dilarang pemerintah kolonial. Pengaruh radikalisme IP, terutama DD diakui Gubernur Jenderal Idenburg bahwa semangat antikolonial sudah menyebar ke tokoh-tokoh Sarekat Islam. Oleh karena itu, pemerintah kolonial harus menindaknya. Dapat dikatakan IP berumur pendek namun bagaikan “sebuah tornado yang melanda Jawa”. IP dibubarkan dan “Tiga Serangkai” dibuang, tetapi organisasi itu diteruskan pengganti-penggantinya dengan nama *Insulinde*, organisasi yang anggotanya heterogin, yang kurang mendapat respon

masyarakat dan pada 1919 ganti nama lagi menjadi *Nationaal Indische Partij* (NIP). Karena orang-orang Indo merasa lebih superior dibanding bumiputra maka perpecahan antar mereka makin dalam dan orang-orang Indo bergabung dalam *Indo Europeesch Verbond* (EIV) pada 1919 yang ingin dekat dengan pemerintah kolonial (Suhartono, 1994: 42).

Ketika di Bandung, SS menjadi ketua SI lokal. Apa yang dilakukan SS tentu memperjuangkan anggota SI mendapatkan persamaan dan antidiskriminasi dalam masyarakat kolonial baik sosial, ekonomi dan politik. Gerakan-gerakan radikal dilakukan diperoleh dari pengalamannya mengawal SI dan memimpin lokal Bandung.

Terhadap “Tiga Serangkai”, pemerintah kolonial menjawab dengan membuangnya meski yang pertama masih ada di lingkungan Hindia Belanda tetapi kemudian mereka minta agar dibuang ke Nederland. Tjipto hanya setahun di Nederland karena sakit, DD kembali 1918 dan KHD kembali ke Indonesia pada 1919 setelah mengalami pembuangan enam tahun di negeri Kincir Angin itu.

Dampak langsung IP khususnya terhadap KHD adalah pengalaman politik yang telah diperjuangkannya meski menghadapi berbagai kendala politik sampai dengan pembuangannya. Namun, hikmahnya KHD makin matang dalam perjuangan politik menghadapi pemerintah kolonial. Secara umum tentunya IP memberi inspirasi semangat dan pendewasaan nasionalisme, cinta tanah air dan perjuangan kemerdekaan.

D. Aksi, Aliansi dan Nonkooperasi: Nasionalisme dan Demokrasi

Suatu gerakan politik sebagaimana dilakukan KHD tidak mungkin hanya ada dalam pikiran perjuangannya saja tetapi harus membuat kombinasi ke arah realitas sebuah gerakan yang nyata dalam melakukan resistensi terhadap pemerintah kolonial. Aksi-aksinya adalah tindakan atas reaksi pemerintah kolonial yang melakukan diskriminasi, represi, hegemoni sosial dan politik sehingga merendahkan martabat sebagai etnik-etnik yang berkarakter. Pendegradasian martabat melunturkan identitas sehingga terjadi kehilangan karakter. Superioritas kolonial sangat mengganggu eksistensi kultur dan masyarakat Jawa karena tekanan-tekanan sosial-politik yang berakibat pada inferioritas yang kompleks. Ketidakpercayaan diri yang dibangun pemerintah kolonial ini harus dikembalikan sehingga bangsa ini berani masuk dalam masyarakat kolonial dan berkompetisi dengan mereka (Ki Hadjar Dewantara, 1952).

Namun, sekali lagi setiap aksi harus memperhitungkan kekuatan diri dan kekuatan lawan. Merujuk teori sejarawan Inggris, A.J. Toynbee “Teori Tantangan dan Jawaban” sangat cocok bila diterapkan pada aksi-aksi melawan kolonialisme Belanda. Jika kekuatan lawan cukup kuat diperlukan aliansi sesama kekuatan politik bumiputra untuk menghadapi kuasa kolonial. Artinya tantangan kolonial harus dijawab dengan kekuatan yang seimbang.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa DD berusaha membangun IP beraliansi dengan KHD dan Tjipto. Perkumpulan

campuran ini anggotanya berjumlah 7.300 orang, hanya ada 1.500 orang Indonesia, sedang anggota Indo berjumlah 5.800 orang (Koch, 1951: 55). Kuasa kolonial lewat bangunan organisasi moderen harus dihadapi lewat bangunan moderen juga, meski hasilnya tokh belum memuaskan. Akan tetapi aksi-aksi IP telah memberikan inspirasi organisasi politik berikutnya di Indonesia makin solid dalam menghadapi pemerintah kolonial.

Diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas dan sejenisnya adalah identitas kolonial yang tidak ingin disentuh dan memang dibuat jarak dengan bumiputra. Melihat keadaan sedemikian ini jelas sukar dilakukan deal sosial-politik karena pada dasarnya sistem politik kolonial yang *gierig* atau pelit dan sulit didekati karena adanya *cultural gap* yang dipertahankan. Sulitya dilakukan pendekatan maka KHD mengambil model nonkoopersi dalam menghadapi pemerintah kolonial. Artinya KHD melakukan perjuangan politik di luar pemerintahan kolonial. Dengan perjuangan cara nonkooperasi ini KHD memlilih mendirikan Sekolah Taman Siswa yang berjiwa ketimuran meski organisasinya mengikuti model Barat. Sekolah ini tentu akan merekrut elite yang sudah dibekali dengan jiwa ketimuran yang *vis ā vis* dengan pemerintah kolonial. Sikap politik nonkooperasi ini akan dibuktikan oleh KHD dalam menghadapi Undang-undang Sekolah Liar, 1932. Undang-undang itu melarang sekolah bumiputra hidup karena sebagai persemaian nasionalis Indonesia. Pertumbuhan sekolah swasta di Jawa dan Sumatera Barat sangat luar biasa 1920-1931-an. Kurikulumnya tidak seragam dan itulah mengapa pemerintah

menyebut “sekolah liar”. Selain itu, guru-guru diharuskan mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi lebih dulu. Pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya sekolah swasta di Indonesia.

Pada 1 Oktober 1932 KHD mengumumkan tantangannya terhadap ordonansi itu lewat telegram kepada Gubernur Jenderal de Jonge bahwa KHD akan mengorganisasikan perlawanan pasif. Pada 3 Oktober dikeluarkan manifesto yang menganjurkan perlawanan. Partindo, PNI, Pasundan, PPPKI, BU, dan Muhammadiyah mendukung perlawanan terhadap ordonansi itu, jadi dukungan terhadap perlawanan KHD makin kuat. Pembatasan apapun terhadap sekolah-sekolah membawa konsekuensi jangka panjang yang sangat berat dan menggoyahkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada akhir Februari 1933 de Jonge menetapkan penghentian pelaksanaan ordonansi itu. Berkat perjuangan Taman Siswa, undang-undang itu akhirnya dicabut dan dampaknya menyatukan semangat organisasi politik untuk terus memperjuangkan kebebasan (Ingleson, 1988: 226-230).

Kekhawatiran pemerintah kolonial adalah perluasan nasionalisme. Meski masih dalam lingkup lokal, organisasi BU dipandang oleh orang-orang Belanda yang berpikiran maju sebagai *oosterse renaissance*, atau renaissance (kelahiran kembali) di timur dengan sebutan “Si Molek telah bangun”. Namun, di pihak lain ada pandangan orang-orang Belanda konservatif yang menyebut lahirnya BU dengan istilah cukup sinis, yang menurutnya, “Orang Jawa banyak cingcong”.

Meski tergambar BU memperjuangkan priyayi, tetapi sebagai gerakan patriotisme lokal BU mempunyai nilai sangat penting karena kepeloporannya sebagai organisasi moderen (Nagazumi, 1986). Memang untuk menghadapi pemerintah kolonial harus dibangun organisasi moderen yang mempunyai pemimpin, massa dan orientasi organisasi yang jelas, yaitu nasionalisme dan kemerdekaan meski masih pada tingkat lokal. Hanya lewat organisasi moderen kolonialisme dapat dilengserkan.

Di pihak lain adalah perkembangan unsur demokrasi yang berhadapan dengan unsur feodal yang masih dominan dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial. Sejak datangnya orang-orang Belanda pertama kali di nusantara terjadi kolusi antara kolonialisme dan feodalisme. Interes kolonialisme adalah mengganggu eksploitasi terhadap bumiputra, sedangkan feodalisme yang sudah lama melakukan eksploitasi secara tradisional dipandang mempunyai akar kuat untuk diajak berkolaborasi mengeksploitasi masyarakat pribumi. Istilah mutakhir kolaborasi yang merugikan kelompok lain dan dipandang sebagai suatu yang negatif adalah kolusi.

Dalam hal kolonialisme dan feodalisme di satu pihak dan demokrasi di pihak lain terdapat prinsip berbeda. Kolonialisme dan feodalisme dalam pengertian "*hand in hand*" alias bekerja sama yang menekankan hirarki dan otokrasi, sedangkan demokrasi menekankan kebersamaan yang bersifat populis. Kecenderungan terakhir kehidupan demokrasi menjadi tujuan utama karena membela kepentingan wong cilik yang selama ini belum pernah terangkat derajat dan martabatnya. Namun

demikian, demokrasi juga mempunyai kandungan negatif meski dalam skala kecil. Tirani demokrasi juga menghantui kehidupan demokrasi secara keseluruhan jika pengelolaan demokrasi tidak hati-hati. Yang pasti demokrasi lebih banyak menguntungkan publik dari pada yang hanya menguntungkan kelompok oligarki.

Demokrasi dan nasionalisme mempunyai hubungan kuat dalam pengertian kepentingan bersama yang mencakup seluruh bangsa. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat (*demos* dan *kratein*: B. Lt.) dan nasionalisme merujuk pada kepentingan untuk bangsa (*natie*: b. Bld), Jadi, rakyat dan bangsa mempunyai cakupan arti, yaitu masyarakat kolektiflah yang harus diperjuangkan. Merujuk pada pakar nasionalisme Prancis, Ernest Renan yang menanyakan “Apa bangsa Itu”? (*Qu’est ce qu’une nation?*). Yang dijawabnya “Bangsa adalah keinginan untuk hidup atau ada bersama” (*Nation est le désir de vivre/d’être ensemble*). Jelas kepentingan bersama yang harus diperjuangkan sebagaimana keinginan KHD maupun pemimpin perjuangan politik Indonesia. Bung Karno sendiri mengakui bahwa nasionalisme harus dibangun lewat keinginan dan kebersamaan (Smith, 1983: 174).

E. Kelanjutan Resistensi : Budaya Politik

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dilakukannya dalam berbagai dimensi, meski lahirnya dimensi-dimensi itu tidak secara simultan tetapi dimensi yang dimunculkan kaum pergerakan sejalan dengan tantangan yang timbul waktu itu. Mengapa BU melakukan terobosan

kultural karena pemerintah kolonial secara politis sudah pasang kuda-kuda dengan mengeluarkan RR 111 (Koch, 1951: 52). Jadi, kaum pergerakan ternyata sangat fleksibel mencari jalan kehidupan pergerakan, meski pada awal gerakannya adalah gerakan emansipasi atau persamaan derajat dalam masyarakat kolonial antara orang-orang Belanda dengan bumiputra. Demikian pula, selanjutnya IP mengubah gerakannya menjadi gerakan politik yang nasionalistis dengan mengakui Hindia (baca Indonesia sebagai tanah airnya). Gerakan selanjutnya berdimensi politik sebagaimana diperjuangkan Sarekat Islam yang menentang diskriminasi ekonomi dengan menyangkutkan kekuatan bumiputra berdasar azas Islam. Gerakan-gerakan dan perjuangan yang multidimensi ini lahir bukan merupakan suatu yang *taken for granted* tetapi melalui tantangan-tantangan kolonial yang diekspose dan jawaban kaum pergerakan yang vleksibel.

Variasi gerakan gerakan yang multidimensi ini dilanjutkan oleh organisasi-organisasi politik yang berdiri kemudian dari yang moderat sampai yang radikal. Pada desenia kedua (1908-1920) corak gerakan masih variatif moderat-radikal yang mencari model yang tepat dalam menghadapi pemerintah kolonial. Pada desenia ketiga (1920-1930) melahirkan gerakan radikal seperti pemogokan, pemberontakan petani, pemberontakan Partai Komunis 1926, pembuangan tokoh-tokoh PNI, dan desenia keempat (1930-1942) bercorak hibrid antara gerakan politik kooperatif dan nonkooperatif yang bergerak pada momen-momen tertentu yang sangat insidental. Pada

periode ini, gerakan politik sangat moderat karena tokoh-tokoh nonkooperasi dibuang oleh pemerintah kolonial, sedangkan tokoh-tokoh kooperasi lebih mendekati pemerintah kolonial dan dengan caranya sendiri bergerak untuk mendapatkan kekuatan di *Volksraad* (Dewan Rakyat). Oleh karena itu, aksi “Indonesia Berparlemen”, 1936, yang dituntut oleh Petisi Sutardjo adalah jalan moderat. Di samping itu masih terjadi gerakan radikal sebagaimana yang diusung oleh Perguruan Taman Siswa yang memperjuangkan dihapuskannya Undang-undang Sekolah Liar, 1932 (Ingleson, 1988:226-230).

Tidak dapat dilupakan gerakan-gerakan sosial keagamaan yang lahir di Indonesia memperkaya gerakan politik pada umumnya. Aksi-sosial keagamaan memperkaya dan memberikan kontribusi pada gerakan politik. Modernisme dan reformisme dari pusat-pusat gerakan Islam seperti Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir dan pusat-pusat yang lain seperti Kadian dan Lahore di India. Modernisme menginginkan pembaruan dari perilaku tradisional sedangkan reformisme berusaha memurnikan ajaran Islam keluar dari bid’ah. Ujung-ujung dari gerakan ini mengalir dan bernuansa nasionalisme Islam sebagaimana direpresentasikan dalam organisasi Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926), Ahmadiyah (1929), Al Irsyad (1914) dan Partai Arab Indonesia (1934). Masih ada gerakan sosial-politik yang lain dalam bentuk organisasi yang lokal seperti Thawalib, Perti, Persis, dan masih banyak lagi (Suhartono, 1994: 43-51).

Islam dan kebangsaan dimunculkan dalam Partai Serikat Islam Indonesia. Islam dan kebangsaan merupakan dua kunci

menghadapi politik kolonial desenia ketiga waktu itu karena awal desenia itu GJ de Jonge yang sangat reaksioner itu menekan keras gerakan nasionalis dengan memenjarakan dan membuang tokoh-tokoh PNI pada 1929 (Ingleson, 1988).

F. Radikalisasi dan Integrasi Nasional: Landasan Kultural Baru

Radikalisasi adalah bentuk dan perilaku perjuangan keras atau radikal dan sering kali fisik menghadapi kolonialisme sebagai lawan perikulu lunak. Perubahan ke arah radikalisasi sudah kelihatan ketika dr. Tjipto Mangoenkoesoemo yang dapat julukan “demokrat sejati” itu gagal menyakinkan kongres BU agar terlibat dalam politik (Nagazumi, 1988). Dia mewakili golongan muda dalam kongres itu minta agar BU mengubah diri dengan berjuang di bidang politik dan keluar dari orientasi kultural. Tentu orientasi politik lebih radikal dibanding kultural lewat gerakan-gerakan politiknya menghadapi penjajah. Oleh karena itu, setelah keluar dari BU, dia bergabung dengan DD dan SS mendirikan IP (1912). Sudah disebut di muka bahwa meski IP gagal mendapatkan izin sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dan hidupnya pendek tetapi jiwa dan semangat radikalisme mengilhami partai politik selanjutnya.

IP mengklasifikasi pengertian nasionalisme berdasarkan ras dan kemutlakan domisili yang dibaginya berdasarkan ras yang dirasakan beda adalah Indo, keturunan campuran dan totok, asli atau *voel bloed* dan di pihak lain dibedakannya antara yang *blijvers*, yang sudah lama tinggal di Hindia Belanda dan

trekkers alias mondar-mandir Nederland-Hindia Belanda. Namun hukum kolonial dengan kuat mengkalifikasinya kalau *inlander* (bumiputera) yang sudah menetap adalah golongan sosial terbawah, dan orang-orang Belanda ditempatkan pada golongan atas, meski di tengahnya ada golongan timur asing.

Gagasan dan realitas nasionalisme yang radikal sudah dimulai di Indonesia sebagaimana disebut di atas yang dipelopori “Tiga Serangkai”. Setelah ketiganya “dibuang ke Nederland semangat nasionalisme radikal itu berkembang dan berkolaborasi dengan *Indonesische Vereeniging* (IV) atau Perhimpunan Indonesia (PI). PI adalah perkumpulan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Nederland yang mempunyai gagasan kuat terhadap nasionalisme Indonesia. Jadi, gagasan nasionalisme Indonesia makin kuat dan terealisasi setelah terjadi kolaborasi tokoh pendatang mantan PI. Pada awal dasawarsa ketiga pernyataan nasionalisme Indonesia semakin menguat di Indonesia. Pidato Moh. Hatta di dalam Konferensi Liga Antiimperialisme di Brussel pada 1927 membuktikan betapa kuatnya semangat melawan penjajah. Pada 1927 Moh. Hatta membela anggota-anggota PI yang ditangkap polisi Belanda dan membebaskannya dengan pembelaan berjudul “*Indonesia Vrij*” atau Indonesia Merdeka (Suhartono 1994: 63). Sekembalinya tamatan universitas di Nederland bergabung dengan aktivis nasionalis di Indonesia sehingga nasionalisme makin menggumpal. Berdirinya dua studi club dan berdirinya PBI dan PNI memberi bukti tersalurkanannya gagasan nasionalisme makin mengristal. Pidato Soekarno di Pengadilan Negeri Bandung yang terkenal dan

berjudul “Indonesia Menggugat” (1929) membuktikan betapa kuatnya perasan dan sikap antikolonialisme dan imperialisme seperti yang disampaikan pembelaan Soekarno di pengadilan itu (Suhartono, 1994: 148).

Paradigma dan konsensus kebangsaan makin nyata setelah terjadinya kolaborasi para mantan anggota PI dari Nederland dan dua anggota studi club di Indonesia. Mereka terus menyuarakan gerakan-gerakan antikolonialisme dan imperialisme dengan cara yang berbeda meski cara nonkooperasi dan kooperasi itu bermuara pada titik temu, yaitu kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi konsensus dan gagasan kebangsaan itu makin berkembang dan di sisi lain juga makin kuat represi pemerintah kolonial dengan *hardzaai artikelen* (pasal karet) yang ujung-ujungnya pembuangan (*interneering dan verbanning*) para nasionalis penentang pemerintah kolonial.

Pada desenia ini kesadaran berbangsa sudah membulat bukan saja kesadaran politik tetapi secara simultan merengkuh kesadaran kultural juga makin menemani gerakan yang multidimensional. Dua peristiwa perlawanan kultural terhadap pemerintah kolonial diwujudkan dalam bentuk Lahirnya Sekolah Taman Siswa (1922) yang akan merekrut elite Indonesia baru mampu menandingi ideologi kolonial. KHD sangat yakin bahwa pemerintah kolonial hanya dapat dikalahkan lewat rekrutmen elite moderen yang paradigmatis, yaitu kehidupan demokratis dalam arti bahwa pemerintah kolonial harus hilang dari bumi nusantara. Peristiwa kultural kedua adalah berlangsungnya Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres pemuda II (28 Oktober

1928) merupakan pijakan kutural untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang pada dasarnya merupakan kesadaran politik bangsa Indonesia berupa pengakuan atas satu nusa, bangsa, dan bahasa Indonesia (Foulcher, 2000). Dilihat dari perkembangan integrasi bangsa maka jelas bahwa Sumpah Pemuda merupakan integrasi bangsa yang makin terealisasikan dan sebagai modal kuat bagi terciptanya Indonesia Merdeka. Berbagai pengakuan dalam Sumpah Pemuda merupakan akumulasi kesadaran nasional (*national consciousness*) akan adanya kesatuan dan persatuan dengan istilah atau kata “satu” yang dijadikan ikatan kuat bagi berbagai etnik, budaya dan bahasa. Hal ini tidak dapat diingkari bahwa sumpah itulah yang akan mengalir dalam realisasi yang masih terbayang (Anderson, 1991).

G. Menjadi Makin Lengkap

Setelah melalui jalan panjang, yaitu perjalanan sosial-politik pergerakan nasional selama tiga dasawarsa termasuk kiprahnya KHD dalam TS menguatkan integrasi nasional, yaitu makin kuatnya kesadaran nasional membanun nasionalisme riil dengan ikrar pemuda Indonesia untuk merealisasikan Indonesia Merdeka. Nasionalisme lokal yaitu nasionalisme jawa terlalu sempit geraknya dan hanya berjuang lewat budaya yang seolah tidak punya kekuatan memaksa. Namun, dari loko-sentrisme kejawaan berkembang ke nasionalisme religio-ekonomi yang dibangun SI. Kekuatan nasionalisme makin nyata dengan pernyataan IP yang tegas mengakui tanah airnya Hindia, mengawali gerakan politik. Pasang surut organisasi lanjutan pada

dasawarsa kedua dan ketiga dengan unsur-unsur sosio-politik diulang kembali menjadi lebih rasional dan radikal.

Dapat ditambahkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan produk kaum inteligensia Indonesia yang menjadi aktor intelektualis “drama nasionalisme Indonesia”. Mereka pencipta identitas nasional yang membangkitkan ekspresi kolektif guna merealisasikan solidaritas nasional. Ikrar itu merupakan pernyataan kepemilikan wilayah (*territory*), bangsa (*social majorities*) yang merupakan massa dan bahasa (*language*) menjadi pengikatnya dan alat komunikasi yang homogin (Smith, 1983). Lagi pula dengan dikumandangkannya Indonesia Raya ciptaan WR Supratman, meski hanya notenya pada 28 Oktober 1928 itu, sebagai lagu kebangsaan makin lengkaplah dan makin dekatlah cita-cita kemerdekaan. Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan di kemudian hari menyemarakkan hiruk-pikuknya nasionalisme Indonesia itu dan menjadi makin lengkaplah nilai persatuan dan kebangsaan.

Rumusan SP adalah bentuk dari identitas nasional yang menjadi simbol persatuan dalam menggalang kekuatan untuk menghadapi ideologi kolonial (*colonial ideology*). Jelas SP merupakan simbol kekuatan tandingan dalam melawan kolonialisme Belanda. Fase ini adalah fase konseptualisasi politik dan kaum pergerakan tinggal melanjutkan serta menambah daya juang dan solidaritas nasionalnya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesempatan internasional yang sedang dicarinya dimana kaum nasionalis dapat memanfaatkan politik internasional untuk menentukan posisinya sebagai negara merdeka.

Sekiranya tidak terjadi Perang Dunia II dan terjadi perubahan politik internasional yang mengaitkan hubungan kolonialisme antara Belanda dan Indonesia niscaya Indonesia Merdeka dapat diraihinya. Dengan persiapan ideologi kemerdekaan yang sudah berproses lama dan diperkuat kecepatan para nasionalis dalam mengambil putusan untuk meraih kemerdekaan maka cita-cita yang sudah dirintis lama itu akhirnya terwujud dalam bentuk Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Semboyan dan ungkapan “Tanah Hindia lepas dari Nederland” dan juga “Indonesia Merdeka, Sekarang” menjadi sangat populer di kalangan nasionalis. Sudah pasti ini merupakan ekspresi kolektif yang tidak dapat ditahan-tahan lagi. Waktunya telah tiba untuk mengaktualisasikan tuntutan kemerdekaan. Para nasionalis sangat optimis bahwa tuntutan kemerdekaan akan terealisasikan, tentunya menunggu perkembangan dan perubahan politik internasional, bahwa dari segi kemanusiaan penjajahan di atas bumi harus dihapus karena tidak sesuai dengan harkat hidup dan kemanusiaan orang banyak.

H. Sekolah Taman Siswa : Resistensi Kultural Terhadap Kolonialisme

Mengapa SS atau KHD mendirikan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922? Menurut KHD, pendidikan adalah alat mobilisasi politik dan sekaligus sebagai penyejahtera umat. Dari pendidikan akan dihasilkan kepemimpinan anak bangsa yang akan memimpin rakyat dan mengajaknya

memperoleh pendidikan yang merata, pendidikan yang bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Jiwa populis KHD sudah mendasarinya untuk menyatu dengan rakyat, sehingga meski beliau keturunan bangsawan yang pada waktu itu terdapat jurang yang lebar dengan kehidupan *wong cilik*, tetapi beliau berusaha menutup celah itu. Sebuah kehidupan yang demokratis yang bisa dinikmati rakyat banyak (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 98-194).

Gagasan mendirikan sekolah atau pendidikan berasal dari sarasehan (diskusi) tiap hari Selasa-Kliwon. Peserta diskusi sangat prihatin (menderita batin) terhadap keadaan pendidikan kolonial. Sistem pendidikan kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik diperlukan lawan tanding, yaitu pendidikan yang humanis dan populis, yang *memayu hayuning bawana* (memelihara kedamaian dunia).

Lalu bagaimana cara KHD merealisasikan cita-citanya? Tentu metode pengajaran kolonial yang harus diubah, yaitu dari sistem pendidikan “perintah dan sanksi (hukuman)” ke pendidikan *pamong*. Pendidikan kolonial didasarkan pada diskriminasi rasial yang di dalamnya sudah terdapat pemahaman kepada anak-anak bumiputra yang menderita inferioritas. Kondisi seperti ini harus diubah dari pendidikan model “perintah dan sanksi”, meski pemerintah kolonial sendiri menggunakan istilah santun “mengadabkan “ bumiputra tetapi dalam praktek cara-cara kolonial yang tidak manusiawi tetap berjalan.

Untuk merealisasikan gagasan itu KHD membuat wadah yang waktu itu disebut “*Nationaal Onderwijs Taman Siswa*”,

sebuah wadah pendidikan nasional, sebuah gagasan yang sudah mencakup seluruh bangsa Indonesia (*nation wide*). Sungguh sangat luar biasa bahwa pendidikan harus menyeluruh ke anak bumiputra alias bangsa Indonesia yang dalam istilah politik disebut nasional.

Menurut KHD pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Tiga hal inilah dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Pengalaman yang diperoleh dalam mendalami pendidikan yang humanis ini dengan menggabungkan model sekolah Maria Montessori (Italia) dan Rabindranath Tagore (India). Menurut KHD dua sistem pendidikan yang dilakukan dua tokoh pendidik ini sangat cocok untuk sistem pendidikan bumiputra. Lalu dari mengadaptasi dua sistem pendidikan itu KHD menemukan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter, yaitu *Patrap Guru*, atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat (Ki Hadjar Dewantara, 1952: 107-115).

Perilaku guru dalam mendidik murid atau anak bangsa menjadi pegangan dan modal utama sehingga KHD menciptakan istilah yang kemudian sangat terkenal, yaitu:

- * *Ing ngarsa sung tulada* (di muka memberi contoh),
 - * *Ing madya mangun karsa* (di tengah membangun cita-cita),
 - * *Tut wuri handayani* (mengikuti dan mendukungnya)
- (Haidar Musyafa, 2015).

Perilaku guru TS ini diterapkan di semua jenjang Pendidikan TS: Taman Indria (Taman Kanak-kanak), Taman Muda (SD), Taman Dewasa (SMP), Taman Madya (SMA), dan Taman Guru (Sarjana Wiyata). Patrap guru yang meliputi semua jenjang pendidikan TS merupakan manifestasi resistensi kultural karena berpusat pada sikap yang berlawanan (antitesis) dengan sikap guru dalam pendidikan kolonial. *“Tut wuri handayani”* dijadikan motto Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Perkembangan sekolah TS 1922-1930 cukup menggembirakan dalam merespon represi pemerintah kolonial. Selama delapan tahun sejak 1922 terjadi perkembangan sekolah TS di nusantara, dari Aceh sampai Indonesia Timur berdiri 30 cabang dan Pusat Persatuan Pengurus TS tetap di Yogyakarta. TS tetap memegang Azas TS (1922) dan Dasar TS (1947) yang sebenarnya saling berhubungan dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Ki Mangun Sarkara meneruskan cita-cuta dan mengaplikasikan gagasan pendidikan TS. Hanya saja Pendidikan TS tidak seperti jaman kolonial, sekarang TS harus membiayai dana pendidikan sendiri dan orientasi masyarakat sudah berubah karena dana belajar dari masyarakat yang makin berkurang. Namun demikian, TS masih merupakan motor dan jiwa penggerak sekolah swasta di Indonesia dengan swadaya, swausaha, dan swakelola. Semangat kebangsaan, semangat kerakyatan dan keluhuran pekerti sebagai pegangan budaya Timur tetap terpancarkan dari TS.

I. Perluasan Perguruan Taman Siswa dan Pernyataan Azas TS 1922

Berdirinya Perguruan TS bukan sebagai institusi tanpa memiliki azas yang bermakna bagi ciri khas bangsa Timur yang membedakan dengan bangsa Barat, lebih-lebih lagi mengenai filsafat dan pemikiran ketimuran. Azas TS memuat perdebatan internal dalam kongres BU dan juga perdebatan sesama pemimpinnya. Hasil perdebatan itu memperkuat pernyataan azas TS (Abdurrachman Surjomihardjo, 1979: 99-100) yang berisi tujuh pasal:

Pasal 1 dan 2 tentang dasar kemerdekaan setiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Ini dimaksudkan agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam tertib bersama. Pasal 1 termasuk kodrat alam dan kemajuan berjalan kodrati alias evolusi. Dasar ini yang mewujudkan sistem “*among*”, artinya guru-guru meski di belakang tetapi mempengaruhi dan memberi jalan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah “*Tut wuri handayani*”. Selain itu, guru bisa memotivasi dan menginovasi pikiran murid dan sekaligus memberi contoh.

Pasal 3 mencakup kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Penyesuaian diri dan hidup kebarat-baratan menimbulkan berbagai kekacauan. Pendidikan Barat mementingkan kecerdasan dan melanggar dasar-dasar kodrati dari kebudayaan sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi kepuasan. Inilah yang disebut dasar Kebudayaan.

Pasal 4 berisi dasar kerakyatan, bahwa pengajaran harus

diperluas dan tidak hanya sekelompok kecil masyarakat.

Pasal 5 merupakan azas sangat penting bagi semua orang yang ingin mengejar kemerdekaan hidup. Azas ini mendasari kemandirian.

Pasal 6 berisi syarat-syarat mengejar kemerdekaan dengan sistem mandiri.

Pasal 7 mengharuskan keikhlasan lahir batin bagi guru-guru untuk mendekati anak didik.

Tujuh pasal ini bisa disebut sebagai “manifes yang penting” dan abadi. Pemimpin TS yang lain, Sarmidi Mangunsarkoro, menyebut pernyataan azas itu sebagai “lanjutan dari cita-cita SS yang terhimpun dalam kelompok rohani *Nationale Indische Partij* (1919-1921) yang merupakan gerakan kebatinan dan kebebasan”.

J. Kesimpulan

Gagasan KHD dalam politik adalah suatu jalan yang harus ditempuh dalam mendapatkan sesuatu di masyarakat kolonial karena pemerintah kolonial dengan represinya selalu menekan hak-hak kaum bumiputra. Menurut dia tentu saja hak-hak itu harus diambil kembali (baca direbut) lewat kombinasi gerakan evolusioner-revolusioner, dari gerakan kultural, ekonomi, dan politik. Perjuangan-perjuangan itu selalu terjadi kombinasi berbagai aspek dan sangat tergantung kekuatan juang mana yang diperlukan dalam menghadapi pemerintah kolonial. Selain itu betapa kuat dan konsistennya KHD dalam memperjuangkan kepentingan yang populis dan demokratis “sama rata sama rasa”.